

KONSERVASI BERBASIS KOMUNITAS RELIGI: MEMBEDAH PERAN ORMAS KEAGAMAAN DALAM UPAYA MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Ulil Amri

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/
Universitas Muhammadiyah Kendari*

ABSTRACT

This article describes the role of religious-based communities in promoting conservation practices. The subjects of research are pesantrens and schools, which affiliated with Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the two biggest and oldest Islamic communities in Indonesia. The idea of conservation is originated from a combination of ethical values based on global environmental movement and the Islamic eco-theology. This idea is manifested into three types of practices including: 1) mitigating environmental destructive activities—mainly deforestation; 2) conducting reforestation; and 3) providing alternative energy resources. Despite their relative success in introducing conservation practices, there are some obstacles that may hamper the future of such practices, i.e. the problem of elite capture, lack of initiative from community members, different views which leads to conflict, and half-hearted commitment of certain community members to support the conservation practices.

Keywords: *Konservasi, Komunitas Religi, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah*

PENGANTAR

Upaya pelestarian sumber daya alam (SDA) dewasa ini telah melahirkan berbagai praktek konservasi¹ SDA dengan perkembangan yang begitu cepat. Dalam kurun waktu lima dekade terakhir, paling tidak telah muncul tiga bentuk praktek, yakni konservasi SDA berbasis peran negara, pasar, dan komunitas

¹ Pengertian konservasi di sini merujuk pada pengertian konservasi menurut aliran *Preservationism* yang memandang bahwa konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup (*ecology*) dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di segala level kehidupan. Aliran ini menitikberatkan hubungan yang seimbang antara manusia (*anthropocentrism*) dan alam semesta (*ecocentrism*) sebagai pusat kajian (Callicott dan Mumford 1997).

(Acheson 2006). Praktek konservasi SDA berbasis negara menitikberatkan pentingnya keberadaan regulasi dan birokrasi. Adanya kombinasi dua hal ini diharapkan praktek konservasi dapat berjalan dengan efektif. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Mata rantai birokrasi yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit justru memandulkan cita-cita pelestarian SDA. Mata rantai birokrasi ini kemudian dijadikan sarana oleh para pemegang kekuasaan untuk melanggengkan praktek korupsi. Bisa dibayangkan, semakin panjang dan gemuk struktur birokrasi suatu pemerintahan, semakin besar pula peluang korupsi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kemudian dikenal istilah 'kegagalan pemerintah' (*government failure*) di mana pemerintah dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai aktor konservasi SDA.

Untuk menjawab kegagalan pemerintah muncullah praktek konservasi SDA yang berbasis pada pasar. Meskipun pada awalnya diyakini bahwa pendekatan ini mampu melepaskan bayang-bayang birokrasi dan regulasi melalui prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensinya, ternyata pasar juga dianggap gagal karena terbukti mengakibatkan eksternalitas. Eksternalitas ini dianggap memicu krisis lingkungan hidup di kemudian hari. Beberapa akibat negatif dari eksternalitas itu adalah polusi udara, tanah, dan air. Kegagalan praktek konservasi SDA oleh pasar ini kemudian dikenal dengan istilah 'kegagalan pasar' (*market failure*).

Pada tahun 1970-an hingga tahun 2000-an para akademisi dan aktivis lingkungan hidup mulai menyebut peran komunitas. Kelompok yang disebut terakhir ini dianggap mampu menjalankan perannya sebagai aktor konservasi SDA yang tepat, karena komunitas dianggap hidup dekat dengan SDA. Akan tetapi, peran komunitas dalam prakteknya juga bukannya tanpa kritikan. Komunitas dianggap tidak memiliki aturan yang jelas mengenai bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan SDA dan pemeliharaannya (Acheson 2006: 127). Dalam kenyataannya, banyak dijumpai komunitas justru tidak mampu membatasi eksploitasi terhadap SDA yang tersedia. Meskipun demikian, berbagai bentuk komunitas justru semakin bermunculan dan memainkan perannya dalam upaya pelestarian SDA. Salah satunya adalah komunitas berbasis religi. Aktor yang disebut belakangan ini berupaya menghilangkan stigma ketiadaan aturan yang jelas dalam praktek yang mereka lakukan dengan menghadirkan nilai-nilai religi sebagai landasan utamanya.

Artikel ini bertujuan untuk menghadirkan praktek konservasi SDA berbasis religi yang menitikberatkan peran komunitas atau organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan. Ada dua ormas yang dipotret oleh artikel ini,

yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Alasannya, kedua ormas ini merupakan yang tertua dan terbesar pengikutnya dibandingkan dengan ormas-ormas keagamaan yang lain. Diharapkan artikel ini tidak sekadar memberikan deskripsi, namun juga tinjauan kritis atas peran ormas-ormas tersebut dalam upaya melestarikan SDA.

Adapun struktur penulisan artikel ini dimulai dengan tinjauan literatur mengenai saling terkaitan antara religi dan konservasi. Artikel ini juga akan mengupas secara singkat latar belakang keterlibatan beberapa ormas keagamaan dalam praktek pemeliharaan SDA, dengan kasus dari kota Yogyakarta, Kota Jakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut. Selanjutnya, artikel ini akan membedah secara detail praktek dan proses manajemen SDA berbasis religi yang diperankan oleh ujung tombak kedua ormas: pesantren dan sekolah di beberapa wilayah di atas, dan kemudian ditutup dengan refleksi kritis atas praktek konservasi SDA yang berbasis komunitas religi. Berbagai macam data mengenai keterlibatan ormas-ormas keagamaan diperoleh penulis dari studi lapangan selama kurang lebih satu tahun dengan teknik pengumpulan data; wawancara dan studi dokumen. Artikel ini mempunyai kekurangan karena hanya menghadirkan perspektif konservasi SDA berbasis agama Islam.²

TINJAUAN LITERATUR

Tulisan Lynn White Jr. (1967) yang berjudul *The Historical Roots of Our Ecological Crisis* telah memantik reaksi agama dalam menyikapi isu degradasi lingkungan. Pada intinya tulisan itu menuduh bahwa agama berada dibalik segala persoalan lingkungan yang dihadapi umat manusia saat ini, sebab ajaran agama memosisikan manusia di atas makhluk-makhluk lain. Akibatnya, manusia merasa memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi ciptaan Tuhan lainnya, seperti alam. Menyusul tulisan White, terdapat beberapa tulisan lain yang tidak kalah tajamnya antara lain dari Ian Harris (1991), Richard Folz and Manya Saadi-Nejad (2007), Nils Peterson and Jianguo Liu (2008), Tanja Winkler (2008), dan Albertina Nugteren (2010). Agama-agama besar dunia memberikan respon yang cukup beragam sebagai sikap terhadap eksploitasi ciptaan Tuhan. Di antara mereka ada yang menolak tuduhan tersebut misalnya agama Kristen³, tapi tidak jarang pula yang menerimanya secara konstruktif.

² Beberapa komunitas agama lain yang cukup aktif dalam upaya konservasi antara lain Buddha Tzu Chi (Buddha), Gereja Kristen Indonesia (Kristen), dan Ordo Fratrum Minorum-Ekopastoral Fransiskan (Katolik).

³ Menurut Jenkins (2009), tulisan White secara spesifik ditujukan kepada agama Kristen Barat

Beberapa di antara mereka menerima kritikan White kemudian mencoba mengkaji kembali nilai-nilai ajaran agama mereka masing-masing, dan selanjutnya menghadirkan sebuah praktek konservasi yang peduli lingkungan.

Hal ini direkam secara gamblang oleh Roger Gottlieb (2006). Di dalam buku yang diberi judul *A Greener Faith: Religious Environmentalism and Our Planet's Future*. Gottlieb menggali tiga aspek untuk melihat sejauh mana komitmen agama-agama terhadap lingkungan, yakni pengalaman (*experience*), keyakinan (*belief*), dan tindakan (*action*). Walhasil, menurutnya agama-agama dunia seperti Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, dan Buddha memiliki ajaran yang menitikberatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selain Gottlieb sebenarnya masih banyak peneliti yang melihat kesungguhan agama-agama dalam upaya melestarikan lingkungan, antara lain Boyd (1984), Khalid (1992), Kinsley (1994), Dewitt (1998), Kaza (2000), Palmer and Finlay (2003), Folz (2003), Mawardi (2007), Mangunjaya dkk. (2010), Bhagwat dkk. (2011).

Nilai-nilai yang terkandung dalam agama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, perlu dibicarakan terlebih dahulu sebelum menyinggung praktek konservasi lingkungan. Dengan cara penulisan seperti disebutkan, dapat diketahui bagaimana peran agama dalam upaya melestarikan lingkungan. Di dalam Injil, ada banyak ayat-ayat yang menyinggung pentingnya memelihara alam dari kerusakan. Beberapa di antaranya adalah *Yesaya* 1–2 dan 7–8 yang mengisahkan perlunya menghadirkan cinta dan keadilan dalam mengelola sumber daya alam; *Kejadian* 11, 20, 22, dan 24 yang menceritakan bahwa Tuhan menghendaki agar bumi digunakan untuk menanam dan menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup, dan Tuhan akan memberi air untuk kelangsungan makhluk hidup tersebut. Tuhan pun mengingatkan agar manusia memanfaatkan dan melestarikan air yang ada di bumi berikut makhluk-makhluk lain yang menyertainya; *Ayub* 25–27 yang berisi informasi bahwa Tuhan telah menganugerahkan hujan untuk tanah dan rerumputan (Rolston 1996: 19–25).

Sementara itu, di dalam ajaran Islam, Al-Qur'an banyak menyinggung hubungan manusia dan lingkungan. Menurut Alie Yafie (2006), beberapa di antaranya adalah *Al-Baqarah* 11–12 yang berisi larangan merusak lingkungan, dan ayat 27 mengenai ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan kerusakan; *Al-*

(Western Christianity) karena ajaran-ajarannya dianggap sangat antroposentris. Oleh karena itu, pihak yang paling menentang tuduhan White tersebut adalah para agamawan Kristen di Barat. Meskipun demikian, tidak semua agamawan Kristen melakukan penolakan.

Maidah 64 mengenai kemurkaan Tuhan atas kerusakan yang terjadi sementara Ia senantiasa menjaganya (*Al-A'raf* 56). Selain itu, ada pula *Al-An'am* 141–142 yang melarang manusia melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam (Mawardi 2007).

Akan halnya dengan agama bumi seperti Buddha, kisah hidup Siddharta Gautama merupakan contoh nyata keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Tidak hanya itu. Sejak awal berkembangnya agama Buddha hingga saat ini, *Sangha*, yaitu kelompok biksu, telah memberikan contoh bagaimana seharusnya umat manusia hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya (Swearer 1997: 181) dan dalam hubungan yang interdependen (Kaza 2000: 197–199).

Pada prakteknya agama-agama di atas juga terlibat langsung dalam upaya konservasi, selain ajaran-ajarannya juga mengandung nilai-nilai konservasi. Beberapa organisasi yang berafiliasi dengan agama tertentu, dan cukup dikenal luas di tataran global antara lain *Evangelical Environmental Network* (Kristen), *Coalition on the Environment and Jewish Life* (Yahudi), *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (Islam), and *Green Sangha* (Buddha) (Posas 2007). Adapun yang bergerak di level nasional adalah *National Religious Partnership for the Environment*, di Kanada (Haluz-Delay 2008), *Common Belief di Australia* di Australia (Millais 2006), serta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia (Amri 2011). Selain itu, terdapat pula organisasi global yang memayungi agama-agama besar dunia dalam upaya konservasi yang dikenal sebagai *Alliance of Religion and Conservation* (ARC) yang berdiri sejak 1986 dan bermarkas di Assisi, Italia. ARC telah merangkul setidaknya 11 agama besar yang juga merepresentasikan sekitar 60 negara di dunia (Palmer dan Finlay 2003: xv).

Meskipun demikian, harus diakui bahwa gerakan konservasi yang diusung oleh berbagai ormas ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan lingkungan global yang muncul sejak awal tahun 1970-an hingga saat ini. Gerakan lingkungan sekuler ini secara perlahan-lahan turut mempengaruhi lahirnya gerakan lingkungan yang ada di ormas-ormas keagamaan, dan ditandai dengan bertemunya nilai-nilai konservasi global dengan nilai-nilai konservasi dalam agama. Pada gilirannya, terbangunlah kesadaran baru pada berbagai ormas keagamaan tersebut, untuk mengusung agenda lingkungan dalam program-programnya. Hal ini terjadi pada ormas NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui, kedua ormas ini bukanlah murni ormas keagamaan yang bergerak di bidang

lingkungan, melainkan sosial ekonomi dan pendidikan. Baru dalam kurun waktu dua atau tiga dekade terakhir mereka menunjukkan keseriusannya mengatasi persoalan lingkungan.

Isu perubahan iklim yang berujung pada pemanasan global menuntut keterlibatan berbagai pihak dalam upaya menghadapi persoalan degradasi lingkungan yang semakin serius. Dalam hal ini, berbagai ormas keagamaan turut menunjukkan perhatiannya terhadap persoalan tersebut. Terbukti berbagai ormas keagamaan termasuk NU dan Muhammadiyah telah menggalakkan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi. Amri (2011) menunjukkan bahwa kedua ormas tersebut antara lain telah menggerakkan organisasi-organisasi di bawahnya seperti sekolah, universitas, pesantren, dan forum-forum pengajian untuk menyosialisasikan perlunya melindungi alam dan menjaganya dari kerusakan. Gerakan ini disertai aksi nyata lainnya semisal penanaman pohon dan rehabilitasi kerusakan lahan. Akan tetapi, Mangunjaya dkk. (2010) meragukan signifikansi gerakan lingkungan khususnya dalam menyikapi perubahan iklim yang diusung oleh kedua ormas keagamaan di atas.

Walaupun demikian, Mangunjaya dkk. (2010) tetap meyakini bahwa secara umum gerakan konservasi yang diperankan oleh berbagai ormas tersebut cukup efektif. Gerakan dimulai dari kalangan ulama dan akademisi muslim yang menaruh perhatian atas persoalan lingkungan, perhatian terhadap upaya pelestarian lingkungan perlahan-lahan tersebar kepada kalangan muslim secara luas. Lebih jauh, muncul pula kegiatan yang bernuansa konservasi dimulai dari dikeluarkannya fatwa lingkungan, kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah Islam, hingga aksi-aksi nyata seperti penanaman pohon secara massal di beberapa daerah. Menarik untuk membedah secara detail peran ormas keagamaan dalam mempraktekkan konservasi SDA di Indonesia. Pada bagian tulisan selanjutnya akan dipaparkan sejarah keterlibatan NU dan Muhammadiyah dengan mengetengahkan kasus pesantren dan sekolah di lima wilayah yakni Yogyakarta, Bantul, Jakarta, Bogor, dan Garut.

LATAR BELAKANG KETERLIBATAN PESANTREN DAN SEKOLAH

Pesantren dan sekolah merupakan ujung tombak ormas seperti NU dan Muhammadiyah dalam gerakan konservasi. Keterlibatan pesantren dan sekolah dalam praktek konservasi SDA tidak dapat dilepaskan dari sejarah keterlibatan organisasi yang memayunginya. NU dikenal luas sebagai ormas Islam yang

bergerak di bidang dakwah dan pemberdayaan sosial ekonomi. Meskipun baru beberapa waktu belakangan ini NU terlibat dalam praktek konservasi secara masif, organisasi ini sudah gencar mengampanyekan kewajiban menjaga lingkungan hidup sejak pertama kali didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Asy'ari dalam ceramah-ceramahnya tidak jarang menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan dan melindungi alam dari kerusakan. Selain itu, secara simbolik ormas ini sudah menunjukkan perhatiannya terhadap nilai-nilai lingkungan hidup di mana logo NU sendiri adalah gambar bumi yang berwarna hijau⁴. Bahkan, praktek-praktek ritual yang dilakukan oleh NU pun tidak terlepas dari isu lingkungan hidup. Ulama NU, khususnya yang ada di Jawa, seringkali mengadakan tahlilan dan shalawatan untuk mengiringi acara sedekah bumi.

Selanjutnya, pada dekade 1970-an NU di bawah K.H. Alie Yafie yang menjabat sebagai *Rais Aam*, pemimpin spiritual tertinggi di tubuh NU, meluncurkan istilah *Fiqh Al-Bi'ah* (Fikih lingkungan) di mana dalam setiap muktamar atau kongres NU, isu lingkungan hidup atau manajemen SDA tidak pernah luput dari pembicaraan. Intinya, Fikih Lingkungan mengkompilasi ayat-ayat Al-Qur'an berikut Hadits-hadits seputar lingkungan hidup. Tidak berselang lama, beberapa pengurus cabang NU di berbagai daerah mulai melakukan konservasi sumber daya hutan dan air. Salah satu ujung tombak kegiatan konservasi itu adalah pesantren. Sebagaimana diketahui, sebagian besar pesantren terletak di area pegunungan, hutan, dan pesisir pantai, di mana air merupakan sumber penghidupan yang utama bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, pesantren sebenarnya sudah sejak lama mempraktekkan konservasi sumber daya air.

Pada tahun 2004, Fikih Lingkungan benar-benar menjadi panduan gerakan setelah sekitar 30 ulama menghadiri pertemuan di Pesantren Darul Ulum, Lido, Bogor. Sebagai buku panduan, sebanyak 5.000 eksemplar buku Fikih Lingkungan telah disebarluaskan ke pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan di seluruh Indonesia (Mangunjaya dkk. 2010: 126). Perlahan-lahan semakin banyak pesantren yang turut terlibat dalam gerakan tersebut. Beberapa pesantren yang dikenal mengusung semangat konservasi dalam kegiatan-kegiatannya ini kemudian diberi label sebagai pesantren berwawasan lingkungan (*eco-pesantren*). Adapun misi yang diemban oleh

⁴ Wawancara dengan Informan I di kantor PB NU, Juli 2010. Menurutnya gambar bumi dan warna hijau identik dengan alam. Oleh karena itu, keberpihakan NU dengan isu-isu lingkungan hidup telah dimulai sejak berdirinya organisasi tersebut.

pesantren ini antara lain mengampanyekan Islam sebagai ajaran yang peduli lingkungan; memberdayakan komunitas pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekitar yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah; memberdayakan masyarakat melalui aktivitas sosial, ekonomi, dan ekologi; menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan kesadaran lingkungan hidup; mengembangkan kawasan pesantren sebagai kawasan yang bersih, sehat, dan asri. Beberapa pesantren kemudian menerima penghargaan kalpataru dari pemerintah atas komitmennya tersebut (Mangunjaya dkk. 2010: 126).

Di kalangan ormas Muhammadiyah, isu lingkungan hidup belum benar-benar menjadi tema sentral hingga ormas tersebut pada tahun 2000 secara resmi membentuk badan yang diberi nama Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (LSPLH). Hal tersebut dikarenakan ormas ini memfokuskan programnya pada dakwah, pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan. LSPLH merupakan lembaga yang melekat pada Pengurus Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Tidak lama setelah didirikan, lembaga ini menjalin kerja sama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan penanaman pohon dan pencahangan kader lingkungan di Muhammadiyah. Dari sinilah cikal-bakal kader-kader lingkungan Muhammadiyah itu muncul di kemudian hari. Selanjutnya, keberadaan lembaga ini dikokohkan dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-45 pada tahun 2005 yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, dan ditandai dengan penggantian nama menjadi Lembaga Lingkungan Hidup (LLH). Meskipun LLH juga masih terpusat, dan belum memiliki pengurus di daerah sehingga gaung gerakannya belum terlihat jelas dan signifikan, pada tahun ini Muhammadiyah telah menggagas Teologi Lingkungan. Ormas ini berpandangan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama dari segala tingkah-laku manusia di muka bumi, termasuk bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam. Teologi tersebut merupakan upaya kristalisasi ayat-ayat Al-Qur'an mengenai lingkungan hidup. Harapannya, teologi ini menjadi panduan bagi umat Islam secara umum, dan warga Muhammadiyah secara khusus. Berbeda halnya dengan Fikih Lingkungan versi NU yang menggabungkan antara Al-Qur'an dan Al-Hadits, Teologi Lingkungan Muhammadiyah hanya bersumberkan Al-Qur'an saja.

Kekuatan LLH sebagai ujung tombak konservasi Muhammadiyah diresmikan pada tahun 2010 dengan meningkatkan status LLH tidak lagi sebagai lembaga melainkan majelis. Dengan demikian nama LLH berubah menjadi Majelis Lingkungan Hidup (MLH). Status yang baru ini membuat MLH memiliki pengurus di daerah, bahkan sampai ke wilayah pelosok sekalipun.

Meskipun demikian, antusiasme kader-kader Muhammadiyah tampaknya mendahului organisasinya, karena sejak awal tahun 2000-an beberapa sekolah Muhammadiyah sudah gencar melakukan gerakan konservasi⁵. Seperti halnya dengan pesantren yang menjadi ujung tombak NU dalam upaya konservasi, sekolah juga berperan sebagai ujung tombak bagi Muhammadiyah. Belakangan, dengan menghangatnya isu perubahan iklim, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga tidak ingin ketinggalan. Beberapa di antaranya sudah menunjukkan komitmen untuk melakukan aksi “menyejukkan bumi”, sebagaimana menjadi semboyan MLH selama ini, sebagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sedang mengancam kehidupan manusia.

Sejak tahun 2004 misalnya, SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta sudah menggalakkan penghijauan. Dimulai dari upaya untuk membersihkan lingkungan hingga gerakan konservasi berupa penanaman pohon di lereng Gunung Merapi. Atas prestasinya sekolah ini pada tahun 2011 dianugerahi penghargaan Adiwiyata Mandiri, yakni penghargaan tertinggi di bidang lingkungan sekolah. Aksi mereka ini disusul oleh SMK Muhammadiyah Bambanglipuro, Bantul. Sekolah ini memfokuskan diri pada pengembangan energi alternatif dengan membuka jurusan khusus bernama “teknik bioenergi”. Semangat yang dibawa oleh sekolah ini merupakan pengejawantahan dari semangat yang diusung oleh Muhammadiyah: pendidikan berwawasan lingkungan hidup dengan yang memberdayakan sosial dan ekonomi masyarakat.

PRAKTEK KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERBASIS RELIGI

Pada bagian ini, tulisan akan difokuskan pada tiga aspek yang dianggap merepresentasikan praktek dan proses manajemen SDA antara lain melawan setiap aktivitas yang merusak lingkungan—khususnya deforestasi—sekali-gus mengampanyekan pentingnya melestarikan lingkungan, menggalakkan aforestasi, dan menciptakan sumber daya dan energi alternatif. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, tulisan ini mengambil kasus di lima wilayah yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut di mana masing-masing ormas terlibat dalam upaya konservasi. Kelima wilayah ini juga dikenal sebagai basis gerakan konservasi ormas tersebut di atas.

⁵ Wawancara dengan Informan II di kantor MLH PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Juni 2011.

Melawan Perusakan Lingkungan

Salah satu bentuk konkret gerakan konservasi ormas keagamaan adalah menghambat laju kerusakan lingkungan. Baik NU maupun Muhammadiyah menyadari akibat yang kelak akan ditimbulkan oleh kerusakan tersebut. Didirikannya lembaga yang bernama Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) di tubuh NU, mengindikasikan hal ini. GNKL secara aktif turun lapangan untuk melakukan pendampingan kepada pesantren di seluruh Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan pegunungan, hutan, sungai, dan pantai. Sementara itu di Muhammadiyah, peranan serupa dipegang oleh MLH. Sebenarnya, wacana mengenai kerusakan lingkungan juga sudah dipahami dengan sangat baik oleh para penggiat pesantren maupun sekolah-sekolah Muhammadiyah. Mereka sudah bergerak tanpa diberi instruksi terlebih dahulu oleh organisasi yang memayunginya.⁶ Perlawanan terhadap perusakan lingkungan pada mulanya dilakukan dengan cara membangun kesadaran ekologis tentang pentingnya menyelamatkan alam dari kerusakan. Di Garut misalnya, perlawanan terhadap perusakan lingkungan dilakukan melalui kegiatan penyadaran yang bersifat edukasi oleh pesantren Al-Wasilah. Dalam setiap kesempatan, pimpinan pesantren ini selalu mengajak orang untuk mengatasi degradasi lingkungan dengan cara menggali akar-akar persoalannya, yaitu pola pikir manusia, dan menyampaikan bahwa persoalan ini merupakan persoalan semua orang. Oleh karena itu, menurut pimpinan pesantren, penyelesaiannya pun harus melibatkan semua orang dengan cara mengubah pola pikir orang-orang itu terlebih dahulu.

“Kerusakan alam pada dasarnya bukan diakibatkan oleh aktivitas yang merusak lingkungan, tapi ‘mindset’ di belakang aktivitas itu: pikiran yang ber-sumber pada individualisme dan kapitalisme. Untuk memperbaiki kondisi lingkungan maka ‘mindset’ manusianya yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Salah satunya melalui pendekatan keagamaan. Undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan presiden tidak berhasil karena dasarnya adalah hukum positif. Daya jangkauannya hanya pada akal saja, dan bisa disiasati. Sedangkan norma agama, daya jangkauannya tidak cuma akal, tapi juga hati manusia yang paling dalam”.⁷

⁶ Hal ini dimungkinkan di tubuh ormas NU sebagaimana diketahui keberadaan pesantren bersifat otonom. PB NU hanya sekadar memberi himbauan. Mengenai bergerak atau tidaknya pesantren adalah mutlak keputusan pesantren sendiri. Demikian halnya di Muhammadiyah, sekolah-sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan improvisasi sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan PP Muhammadiyah.

⁷ Wawancara dengan Informan III pada Juli 2011, Garut.

Selanjutnya, dalam aksinya pimpinan pesantren menggerakkan kalangan lebih luas seperti preman yang ada di Garut. Mereka diajak untuk menjaga pohon-pohon yang ada di sekitar Kabupaten Garut termasuk bibit pohon yang baru saja ditanam oleh komunitas pesantren. Preman-preman ini secara kebetulan ikut bergabung dalam komunitas persemaian yang dibentuk oleh sang pimpinan. Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan oleh sang kiai mengingat pengaruhnya yang besar, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Dengan demikian, sang pimpinan dapat mengajak semua orang untuk menghentikan kerusakan lingkungan.

Hal yang sama dilakukan juga oleh pesantren Darunnajah. Pondok pesantren yang terletak di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan ini dikenal sebagai salah satu pesantren terbaik se-Indonesia dan masuk dalam kategori pesantren berwawasan lingkungan versi KLH. Selain itu, Darunnajah juga dikenal sangat menentang kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pesantren adalah mendidik santri untuk peka terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Para pengajar pesantren diberi tugas untuk menanamkan kesadaran lingkungan kepada para santri dalam bentuk ceramah maupun kegiatan-kegiatan praktis. Beberapa di antaranya adalah dibentuknya secara reguler kader-kader lingkungan yang diberi nama *Green Hero* untuk santri laki-laki dan *Green Shero* untuk santri perempuan yang jumlahnya mencapai 100 orang.⁸ Adapun tugas mereka adalah menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Secara reguler pula, pesantren mengirim 30 orang santrinya untuk kampanye lingkungan di luar area pesantren, baik yang dekat maupun jauh, dengan tujuan agar kesadaran menjaga lingkungan juga tersebar luas di lingkungan lainnya. Apalagi daerah Pesanggrahan ini juga dikenal masih cukup hijau dibanding dengan wilayah sekitar ibu kota lainnya, di mana masih terdapat banyak pohon-pohon berukuran tinggi yang berdiri kokoh.

Sementara itu, di kalangan sekolah Muhammadiyah gerakan melawan kerusakan lingkungan dilakukan dengan cara menumbuhkembangkan kesadaran anak didik terhadap dampak yang telah diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta. Sekolah yang berdiri tepat di tengah jantung kota Yogyakarta ini mengenalkan pada murid-muridnya motto bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah berbudaya lingkungan. Selain menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan

⁸ Wawancara dengan Informan IV di Pesantren Darunnajah, Jakarta Juli 2011

melalui materi ajar sekolah, SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta juga menyambut gerakan yang dicetuskan oleh MLH, yakni aksi hijau di mana salah satu upaya konkretnya adalah menghemat penggunaan kertas. Dengan melakukan penghematan tersebut, jumlah pohon yang ditebang perlahan-lahan akan berkurang. Bagi Muhammadiyah, pada setiap 15 rim kertas dibutuhkan sebatang pohon yang usianya sekitar 10 tahun. Lebih jauh, komitmen SMP 1 Muhammadiyah ini ditunjukkan dengan mengirimkan ratusan siswa ke Taman Nasional Gunung Merapi dan waduk *Gajah Mungkur* Wonogiri dalam rangka penanaman seribu pohon.⁹

Menggalakkan aforestasi

Salah satu upaya konkret lain yang dilakukan oleh kalangan pesantren dan sekolah dalam praktek konservasi SDA sebagai kelanjutan dari wujud perlawanan mereka terhadap kerusakan lingkungan, adalah menggalakkan aforestasi. Di sela-sela kegiatannya sebagai lembaga pendidikan, pesantren Darunnajah juga menggiatkan program penanaman pohon. Salah satu cabang pondok pesantren Darunnajah yang berada di Cipining, Bogor dikhususkan sebagai tempat penanaman pohon trembesi yang luasnya mencapai 250 ha. Para pengelola pesantren juga mengenakan syarat kepada calon santrinya agar menyeter satu pohon untuk tiap satu santri. Selanjutnya, pohon yang terkumpul itu dialokasikan ke tanah kosong milik pesantren untuk ditanami. Program ini diberi nama “Bank Pohon”. Dalam upayanya melakukan aforestasi ini, pihak pesantren melibatkan masyarakat sekitar, tidak hanya sebagai penanam dan pemelihara, tapi juga ikut mengambil manfaat dari pohon tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip NU yang mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi di mana sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia sembari menjaganya dari kepunahan atau kerusakan.

Lebih jauh, pesantren Darunnajah juga mendorong siswanya untuk melakukan konservasi di daerah pantai antara lain Muara Angke dengan melakukan penanaman pohon bakau yang jumlahnya mencapai 900 pohon. Sebagaimana diketahui, daerah kawasan pesisir ibu kota, kini sudah semakin terabaikan kelestariannya. Tiap santri diminta untuk membawa satu pohon yang tingginya seukuran tubuh mereka. Adapun nilai yang ditanamkan saat melaksanakan program ini merupakan kontekstualisasi dari teologi lingkungan yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan penanaman pohon dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya kelak akan diberi ganjaran setimpal

⁹ Wawancara dengan Informan V, SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta, Juni 2011

oleh Tuhan. Dalam kegiatan ini, pesantren bekerja sama dengan pihak pemerintah dan juga swasta.

Sementara itu, di pesantren Al-Wasilah, kegiatan aforestasi dilakukan dengan cara melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Mula-mula gerakan ini dirintis melalui kelompok persemaian yang dipimpin langsung oleh sang kiai. Selama tujuh bulan lamanya pesantren melakukan sosialisasi ke berbagai kecamatan dan desa-desa. Pada tahap pertama, pihak pesantren memperkenalkan aspek teologis pengelolaan lingkungan kepada masyarakat. Selanjutnya, pesantren membentuk kelompok-kelompok persemaian yang bertugas membuat *polybag* atau pot, dan menanam bibit pohon. Dalam kurun waktu tersebut masyarakat juga diberi pelatihan mengenai cara melakukan penanaman pohon dan memeliharanya. Setelah setahun, terhitung sejak masa inisiasi hingga persemaian, sudah terdapat 116 kelompok persemaian yang berhasil menanam sedikitnya dua juta pohon. Sesuai dengan prinsip yang dipegang NU, pesantren ini juga mengutamakan aspek sosial ekonomi dalam menjalankan programnya. Hal itu dapat diketahui bahwa pada saat ini pesantren sudah melepas kelompok-kelompok persemaian tersebut menjadi kelompok yang mandiri dan mampu memetik keuntungan ekonomi dari program yang sudah mereka laksanakan.

Dalam program aforestasi ini, pesantren menekankan agar kelompok-kelompok masyarakat atau bahkan individu-individu yang ada di dalamnya mempunyai rasa kepemilikan atas pohon yang sudah mereka tanam agar terus terpelihara dengan baik. Pengembangan kelompok dilakukan dengan cara pesantren mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mencari mitra strategis seperti pihak swasta ataupun pemerintah lokal. Meskipun demikian, pesantren Al-Wasilah tetap bersedia jika sewaktu-waktu kelompok persemaian tersebut ingin mengadakan pelatihan pengelolaan lingkungan tahap lanjut. Dalam perjalanan waktu, bukan tak ada aral yang melintang. Persoalan utama yang dihadapi oleh program persemaian ini adalah konflik pengelolaan lahan. Walaupun demikian, penghijauan di Garut tidak berhenti. Malahan, sang kyai mengklaim bahwa program persemaian yang dirintis oleh pesantrennya ini telah membawa Garut sebagai kabupaten yang cukup sukses dalam program reboisasi lahan lingkungan.

Pesantren lain adalah Darul Muttaqin yang terletak di daerah Parung, Bogor. Pesantren ini berdiri pada tahun 1988, dan sejak saat itu pula sudah identik dengan lingkungan. Jumlah santrinya terus bertambah di tiap tahunnya.

Meskipun demikian, pesantren ini enggan mengurangi lahan-lahan hijau tempat di mana pohon-pohon jati berdiri dengan kokohnya. Malahan, berkat bantuan seorang pewakaf, tanah seluas 14,5 ha itu ditanami dengan pohon yang baru. Darul Muttaqin kerap melakukan penghijauan di daerah sekitar. Jika ditemukan lahan kosong, pesantren tidak ragu untuk menanaminya dengan bibit pohon milik pesantren. Sejauh ini, pesantren Darul Muttaqin sudah menarik perhatian dunia internasional karena terpilih sebagai pesantren perintis untuk menjadikan Bogor sebagai “Kota Hijau” (*Al-Khaer*) pada saat diselenggarakannya *Muslim Association for Climate Change Action* pada tahun 2010 yang lalu.

Di Kabupaten Bantul, program aforestasi digalakkan oleh dua buah pesantren, yakni Al-Imdad dan Darul Ulum. Pesantren Al-Imdad misalnya, telah mengalokasikan sebagian lahannya untuk tempat pembibitan tanaman dan pepohonan. Beberapa jenis tanaman yang dikembangbiakkan adalah pepaya, pisang kepok, cabai rawit, ubi kayu, jambu, dan mangga. Adapun pepohonan yang dikembangbiakkan antara lain jati, sengon, dan mahoni. Selain itu, pesantren ini juga mengembangkan jenis-jenis tanaman dan pohon di atas tanah milik masyarakat dengan bibit yang disuplai oleh pihak pesantren. Adapun keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi bersama antara pesantren dan masyarakat. Sejauh ini Al-Imdad sudah menanam ribuan bibit pohon di beberapa kecamatan di sekitar Bantul. Menurut pengasuh pesantren, Al-Imdad sejauh ini memang berniat memberi sedekah pada masyarakat sekitar dengan memberikan bibit dan menanam pohon.¹⁰

Demikian juga halnya dengan pesantren Darul Ulum. Pesantren yang berafiliasi pada Muhammadiyah ini sudah aktif mendistribusikan bibit pohon kepada masyarakat di sekitar Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan. Sebenarnya pesantren ini bukanlah pesantren biasa yang memiliki santri dan pengasuh. Darul Ulum didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelatihan sosial ekonomi guna mengembangkan kemampuan wirausaha masyarakat Potorono khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Kendati demikian, berkat jaringan kerjasama yang baik dengan pihak Departemen Kehutanan, pesantren ini berhasil mendapatkan bantuan bibit pohon trembesi, sawo, dan mangga yang jumlahnya mencapai 50.000 pohon. Sebagian besar pohon ini sudah berhasil ditanam oleh penduduk sekitar. Secara teologis, tujuan yang ingin dicapai oleh Darul Ulum adalah menjadikan

¹⁰ Wawancara dengan Informan VI, di pesantren Al-Imdad, Bantul, Juli 2011

lingkungan sekitarnya sebagai ‘*Qaryah Thayyibah*’ atau desa yang berdaya mandiri sesuai dengan tuntunan Islam.

Menciptakan Sumber Daya dan Energi Alternatif

Ada dua alasan terjunnya ormas keagamaan ke dalam gerakan penciptaan sumber daya dan energi alternatif. *Pertama*, alasan ekologis. Selama ini penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi (*fossil energy*) dikenal sebagai penyumbang terbesar meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di udara yang mengakibatkan semakin menghangatnya temperatur bumi yang dikenal sebagai pemanasan global (*global warming*). Oleh karena itu, penting bagi ormas keagamaan untuk ikut serta mengembangkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas persoalan ekologis dibalik penggunaan energi fosil yang berdampak buruk pada lingkungan hidup. *Kedua*, alasan ekonomi. Adanya kenyataan bahwa sebagian besar negara-negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia, sedang mengalami krisis energi fosil di mana jumlah ketersediaannya semakin menipis, tetapi harganya yang semakin melambung, telah mendorong banyak pihak untuk mencari energi alternatif yang ramah lingkungan. Melalui salah satu ujung tombaknya, SMK 1 Bambanglipuro, Bantul, Muhammadiyah merintis program penciptaan sumber daya dan energi alternatif yang disebut bahan bakar nabati terbarukan (*biofuel*).

Secara khusus SMK ini membuka jurusan yang diberi nama teknik bioenergi yang didukung dengan fasilitas berupa kelas dan laboratorium khusus yang sebagian besar peralatannya dirakit secara sederhana dari barang-barang bekas yang dikumpulkan oleh para guru dan murid-murid dari beberapa tempat di sekitar sekolah. Adapun bahan yang digunakan untuk mengolah bioenergi antara lain berasal dari tumbuhan seperti ubi kayu. Di samping itu, untuk produksi massal tumbuhan tersebut, pihak SMK telah memanfaatkan lahan tidur yang ada di sekitar sekolah. Dari bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi etanol yang nanti akan dicampur dengan bensin. Hasilnya dapat meningkatkan kadar oktan yang di satu sisi akan memudahkan terjadinya pembakaran, dan di sisi lain juga lebih ramah lingkungan. Selain menciptakan bahan bakar nabati, sekolah ini juga mengelola sampah-sampah yang berasal dari tumbuhan dan dedaunan baik dari sekolah maupun masyarakat untuk diolah menjadi bahan bakar berupa arang.

Jurusan yang didirikan pada tahun 2008 ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang piawai menciptakan bahan bakar nabati dan menjadi pionir bagi lingkungan sekelilingnya. Oleh sekolah, para lulusan ini tidak hanya dibekali

dengan kemampuan teknis mengelola limbah menjadi energi semata, tetapi juga nilai-nilai teologis, agar setelah lulus kelak mereka bisa menjadi orang yang tidak saja membawa keuntungan bagi dirinya, tetapi juga lingkungannya.

“Anak-anak dididik untuk memperkuat teori dan praktek sekaligus. Selain itu, mereka juga diperkaya dengan nilai-nilai teologi. Misalnya, di dalam ajaran Islam, jika seseorang beramal, maka ia akan dapat balasan yang berlipatganda sesudahnya”¹¹.

Energi alternatif juga dikembangkan oleh pesantren Darul Ulum. Pesantren ini memiliki peternakan sapi yang limbahnya digunakan untuk pengolahan biogas. Dalam membangun fasilitas pengolah biogas ini, pesantren bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan *Technische Universiteit Eindhoven*, Belanda, yang kemudian menghasilkan alat yang diberi nama ‘*Dygestor Fixed Doom*’. Beberapa keuntungan yang sudah diperoleh oleh pesantren maupun masyarakat Potorono adalah gas dan pupuk organik sisa dari pengolahan gas tersebut. Dari pupuk organik misalnya, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian. Sedangkan dari gas itu sendiri, beberapa rumah tangga sudah mulai menggunakannya. Namun, karena kendala teknis, keterbatasan jumlah pipa, belum semua rumah tangga bisa menikmati gas tersebut. Walaupun demikian, biogas tersebut sudah mampu menyuplai acara-acara besar di lingkungan Potorono, seperti pengajian di masjid dan kegiatan majelis taklim. Selain itu, masyarakat juga sudah gemar mengolah sampah rumah tangganya sendiri dengan cara mendirikan kandang sampah bersama yang kemudian diolah menjadi pupuk.

Pengelolaan sampah rumah tangga juga dilakukan oleh pesantren Al-Imdad. Pesantren yang berafiliasi dengan ormas NU ini menyediakan tempat sampah di tiap-tiap rumah, khususnya di dusun Kauman yang jumlahnya sekitar 150 kepala keluarga. Dari sampah rumah tangga dan pesantren, Al-Imdad kemudian mengolahnya di sebuah tempat khusus yang terletak tidak jauh dari pesantren. Ide program ini bermula dari tercemarnya Kali Kauman akibat kebiasaan penduduk dusun membuang sampah sembarangan. Sejak itu, pimpinan pesantren mengeluarkan imbauan saat ia memberikan ceramah, agar penduduk mengubah kebiasaannya, dan untuk itu pesantren akan memberikan bantuan. Saat ini, Al-Imdad mengumpulkan sampah organik maupun non-organik yang kemudian mengolahnya secara kreatif. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dimanfaatkan untuk kepentingan pesantren maupun

¹¹ Wawancara dengan Informan VII, SMK 1 Muhammadiyah Bambanglipuro, Bantul, Juli 2011.

masyarakat. Sedangkan sampah non-organik diubah menjadi kerajinan tangan yang kemudian dijual di pasar-pasar terdekat. Adapun sampah sisa makanan dijadikan makanan ternak milik pesantren. Tujuan pengelolaan sampah ini bagi pesantren adalah untuk menghindari pembuangan sampah yang sia-sia.

REFLEKSI DARI LAPANGAN

Paparan di atas memperlihatkan perlunya refleksi atas praktek konservasi SDA berbasis komunitas religi. Beberapa poin penting yang patut untuk direfleksikan antara lain adalah teologi lingkungan hidup yang dipegang teguh oleh ormas, peran pemimpin ormas keagamaan dalam praktek konservasi, dan sistem manajemen yang memungkinkan ormas-ormas tersebut bergerak secara fleksibel menghadapi tuntutan lingkungan sosial.

Teologi adalah aturan utama yang menjadi landasan bagi ormas keagamaan dalam upaya konservasi SDA. Teologi juga diyakini memiliki akar yang kuat dan mampu menarik dukungan publik secara luas yang siap terlibat dalam upaya konservasi (Van Houtan 2006; Palmer dan Finlay 2003) karena sifatnya yang unik. Di satu sisi teologi menjadi semacam perintah bagi para pengikutnya, tapi di sisi lain ia juga menjadi penggugah kesadaran para pengikutnya itu untuk melakukan sesuatu secara sukarela. Berangkat dari nilai-nilai teologi Islam mengenai pentingnya melestarikan lingkungan, ormas seperti NU dan Muhammadiyah telah menunjukkan komitmennya terhadap konservasi SDA. Kedua ormas tersebut melakukan beberapa gerakan nyata dan cukup efektif di beberapa daerah dengan dukungan para pengikutnya. Hal semacam inilah yang membedakannya dengan komunitas-komunitas konservasi yang lain. Komunitas konservasi yang tidak berbasiskan pada nilai religi tampaknya kurang memiliki magnet untuk menarik dukungan banyak pihak sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas yang berbasis nilai religi. Dalam banyak kasus bahkan komunitas-komunitas konservasi yang berbasis non-religi atau sekuler ini cenderung hanya mampu menggerakkan beberapa orang yang berada dalam komunitas tersebut.

Magnet dukungan yang dimiliki oleh komunitas berbasis religi ini terletak pada hubungan yang kuat antara pemimpin agama dan para pengikutnya. Para pemimpin agama telah menjelma menjadi penggerak utama konservasi berbasis religi. Pengetahuan yang mendalam di bidang agama menempatkan mereka pada posisi penting di tengah masyarakat, baik sebagai panutan, pencerah, pembimbing maupun pemecah berbagai macam persoalan hidup

yang dihadapi oleh para pengikutnya. Kapasitas yang dimiliki oleh pemimpin agama mampu membuat para pengikutnya rela menunjukkan kepatuhan yang luar biasa. Hubungan patron-klien semacam ini pun menjadi langgeng karena intensitas hubungan antara pemimpin dan pengikutnya terjadi secara terus-menerus di berbagai arena, seperti masjid, pesantren, sekolah, dan forum-forum keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan ketika sang pemimpin meminta para pengikutnya melakukan sesuatu, mereka pun akan melakukannya dengan sungguh-sungguh.

Efektivitas gerakan konservasi ormas-ormas keagamaan ini juga dipengaruhi oleh sistem manajemen yang mengedepankan otonomi atau kemerdekaan bergerak. Hal ini bisa dilihat dari struktur dan mekanisme kerja gerakan komunitas-komunitas tersebut. Meskipun di kalangan NU dan Muhammadiyah memiliki sistem yang sentralistik, terdapat ketua umum yang bertanggung jawab atas seluruh program-program kerja organisasi, keduanya memperkenankan komunitas-komunitas di bawahnya semisal pesantren di kalangan NU dan sekolah di kalangan Muhammadiyah, untuk bergerak menyesuaikan program-programnya dengan realitas sosial yang ada di lingkungannya masing-masing. Di Garut misalnya, pesantren Al-Wasilah melakukan gerakan aforestasi dengan inisiatif sendiri setelah melihat laju deforestasi yang begitu cepat di kabupaten tersebut. Demikian juga halnya dengan pesantren Darul Ulum di Bantul yang berinisiatif melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam hal ini adalah universitas dari luar negeri tanpa harus berkonsultasi dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah terlebih dahulu. Walaupun begitu, tiap-tiap lembaga tersebut tetap memegang teguh ideologi organisasi payungnya masing-masing. Artinya, komunitas-komunitas tersebut bebas untuk berkreasi selama tidak bertentangan dengan garis ideologi organisasi di atasnya.

Secara umum, ideologi gerakan konservasi yang berbasis religi memiliki beragam variasi. Di negara-negara maju misalnya, ormas keagamaan murni mengusung teologi dan gerakan lingkungan dalam program-programnya. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, khususnya di tubuh NU dan Muhammadiyah, isu lingkungan hidup lebih cenderung dikombinasikan dengan isu-isu lain seperti sosial-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sejauh ini hasilnya pun menunjukkan perbedaan yang nyata. Kalau di negara-negara maju, ormas keagamaan telah banyak turut serta dalam upaya memproteksi lingkungan hidup dari kerusakan dan ikut mempengaruhi kebijakan

negara¹², di Indonesia, upaya-upaya seperti itu tidak begitu tampak. Gerakan konservasi SDA yang dipraktekkan oleh NU dan Muhammadiyah selalu diikuti oleh pertimbangan sosial-ekonomi mengenai ada tidaknya manfaat yang bisa diperoleh oleh anggota komunitas ketika melakukan konservasi. Selain itu, gerakan konservasi berbasis religi di Indonesia tampaknya tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kemandirian. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bantuan-bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas untuk melancarkan upaya konservasi tersebut. Namun demikian, hal ini justru menunjukkan bahwa gerakan konservasi berbasis komunitas religi sesungguhnya sangat fleksibel.

NU dan Muhammadiyah sangat terbuka bekerjasama dengan pihak lain. Dalam beberapa kesempatan kedua ormas tersebut menyepakati beberapa skema kerja sama terutama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun asing untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa institusi pemerintah itu antara lain Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin populernya isu pemanasan global, ormas-ormas tersebut juga aktif menjalin kerjasama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim. Pemerintah asing yang aktif menjalin kerjasama dengan kedua ormas ini antara lain Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development*, Australia melalui *Australia Agency for International Development*, dan *European Union*. Sedangkan dari pihak lembaga swadaya masyarakat, NU sejauh ini sudah bekerja sama dengan *World Wide Fund for Nature* dan Muhammadiyah dengan *Conservation International*.

Keunikan sifat teologi lingkungan hidup yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah, telah menjadi penyeimbang antara panduan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di satu sisi, dan rambu-rambu yang harus diperhatikan saat memenuhi kebutuhan hidup para pengikutnya di sisi lain. Berbagai macam program dimulai dari aforestasi hingga penciptaan sumber daya dan energi alternatif, memperlihatkan bagaimana nilai-nilai teologi tersebut diimplementasikan untuk menyeimbangkan dua hal di atas. Ini sejalan dengan pandangan Bhagwat dkk. (2011) yang menyatakan bahwa teologi lingkungan yang dimiliki oleh agama-agama mengandung unsur

¹² Diskusi mengenai peran ormas keagamaan dalam mempengaruhi kebijakan negara dikupas secara baik oleh Roger Gottlieb dalam bukunya yang berjudul *Greener Faith: Religious Environmentalism and Our Planet's Future* (2006).

kepemimpinan di muka bumi (*stewardship*), penghormatan terhadap alam (*reverence for nature*), pengorbanan (*altruism*), dan belas kasih (*compassion*). Di satu sisi, teologi lingkungan mengajarkan bahwa kepemimpinan di muka bumi ditunjukkan dengan mengelola SDA secara bertanggung jawab di mana manusia sebagai wakil Tuhan diberi hak mengelola dan mengambil manfaat dari alam. Sementara di sisi lain, teologi lingkungan menganjurkan manusia untuk menunjukkan penghormatan, pengorbanan, dan belas kasih terhadap alam melalui berbagai macam ritual dan praktek konservasi.

Namun demikian, praktek konservasi SDA berbasis religi bukannya tanpa kekurangan. Paling tidak ada beberapa catatan yang dapat disampaikan di sini antara lain: keberadaan dan peran pemimpin agama yang berpotensi melahirkan problem “kontrol elite” (*elite control*) atau “tangkapan elit” (*elite capture*) baru, kurangnya inisiatif dari para pengikut, adanya perbedaan referensi teologis tiap-tiap agama atau ormas dan kecurigaan-kecurigaan terhadap agama atau ormas lain yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, dan komitmen setengah hati sebagian pengikut ormas keagamaan dalam mengimplementasikan gerakan konservasi SDA. Keberadaan para pemimpin agama sebagai penggerak utama gerakan konservasi berbasis religi memang tidak diragukan lagi. Akan tetapi, peran sentral para pemimpin religius ini justru berpotensi menghadirkan problem kontrol elite dalam praktek konservasi. Padahal, dalam berbagai kajian mengenai pembangunan komunitas, kemunculan kontrol elit semacam inilah yang patut diwaspadai (Cooke & Kothari 2002; Platteau 2004) di mana para elite lokal melakukan manuver tertentu untuk menguasai, mengontrol, mendominasi pengambilan keputusan, memperbesar pengaruhnya, dan mengambil keuntungan tertentu dari suatu aktivitas. Hadirnya kontrol elite merupakan konsekuensi dari praktek politik desentralisasi yang mulai diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2001 yang memberi ruang untuk munculnya elite-elite baru di banyak tempat. Akibatnya, terjadi penyumbatan gerakan atau aksi kolektif yang murni merupakan inisiatif masyarakat akar rumput. Hal ini dapat dilihat dari cukup dominannya peran para pemimpin religius dalam menentukan arah program konservasi di tiap-tiap komunitas yang dipimpinnya, baik itu pesantren maupun sekolah.

Pada sisi lain, kuatnya “kontrol elite” ini disebabkan juga oleh lemahnya suara-suara dari akar rumput. Sebagian besar dari mereka justru hanya tampil sebagai pelengkap gerakan konservasi yang diinisiasi oleh pimpinan ormas. Sebagian dari para pengikut ini adalah murid atau santri yang posisinya

tersubordinasi oleh para guru atau pengasuh pesantren. Sementara sebagian yang lain tampaknya telah tersubordinasi secara sosiokultural. Kebanyakan dari mereka—yang disebut belakangan—tidak berpendidikan tinggi dan tidak memiliki akses kepada sumber daya yang ada. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan konservasi atau pelestarian lingkungan. Walaupun demikian, tulisan ini tidak ingin terjebak pada dikotomi patron-klien atau elite-rakyat kebanyakan. Sebab, dalam perspektif ilmu sosial kontemporer, kuasa (*power*) diyakini tidak selalu menjadi milik para elite, melainkan juga rakyat kebanyakan karena sifatnya yang dinamis dan selalu dapat dinegosiasikan, dan pada kenyataannya di lapangan, tidak jarang terjadi hubungan dialogis dan mutual antara kedua kelompok sosial ini.

Perbedaan referensi teologis bisa terjadi antara komunitas keagamaan satu dengan yang lain maupun intra komunitas keagamaan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan teologis di antara komunitas-komunitas tersebut yang kemudian memunculkan perbedaan interpretasi dan praktek keberagamaan. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas sangat mengkhawatirkan manakala praktek teologis ini melahirkan gesekan yang berujung pada konflik horizontal antarkomunitas keagamaan. Salah satu contohnya adalah perbedaan interpretasi mengenai konsep kesucian yang secara baik diilustrasikan oleh Taylor (2010). Menurutnya, agama-agama langit percaya bahwa kesucian itu berada jauh di luar bumi (*beyond earth*), sementara agama-agama bumi percaya sebaliknya, kesucian itu justru berada di bumi. Akibatnya, sering kali pengikut agama langit dituduh tidak terlalu peduli dengan kelestarian bumi oleh kalangan penganut agama bumi.

Selain itu, konflik juga bisa terjadi akibat isu-isu lain seperti perbedaan identitas maupun kepentingan yang sebelumnya pernah menyulut konflik di antara komunitas-komunitas tersebut. Perbedaan identitas Arab yang identik dengan Islam, dan Israel yang identik dengan Yahudi yang kerap berseteru memperebutkan wilayah di Palestina, tampaknya berpotensi mempengaruhi efektivitas dan soliditas gerakan konservasi lintas agama. Dalam lingkup yang lebih kecil, NU dan Muhammadiyah yang dahulu pernah berbeda pandangan secara tajam mengenai praktek ritual tertentu dalam Islam, juga berpotensi menemui perbedaan dalam menyikapi isu lingkungan hidup di masa yang akan datang. Apalagi kedua ormas keagamaan ini secara kontinu terus memperbesar pengaruhnya dan mendemonstrasikan identitasnya, termasuk dalam praktek konservasi lingkungan, tanpa adanya koordinasi dan komunikasi satu sama

lain. Belum lagi persoalan jaringan kerja sama dengan pihak donor. Studi yang dilakukan Clarke (2007), misalnya mengindikasikan bahwa konflik antar ormas keagamaan sering kali terjadi akibat relasi ormas dengan donor tertentu di mana donor tersebut hanya memberikan bantuan pada satu ormas dan enggan memberikan bantuan kepada ormas lainnya.

Terakhir, terlihat adanya komitmen setengah hati sebagian pengikut ormas keagamaan terhadap praktek konservasi yang sudah dicanangkan¹³. Hal ini cukup beralasan mengingat pada prinsipnya kedua ormas tersebut bergerak di bidang sosial-ekonomi dan pendidikan, bukan lingkungan. Komitmen setengah hati ini terlihat dari masih banyaknya organisasi-organisasi, pesantren maupun sekolah, di bawah ormas yang belum mempraktekkan konservasi SDA sebagaimana telah digariskan dalam teologi yang diperkuat dengan hasil keputusan Mukktamar di kedua ormas keagamaan ini. Para pengikut ormas ini tidak sedikit yang terlibat dalam aktivitas yang justru kontra produktif dengan pelestarian lingkungan, semisal pembalakan liar, bisnis penjualan kayu jati dan meubel, dan pencemaran lingkungan air dan sungai. Meskipun demikian, masih terlalu dini untuk memberikan evaluasi atas praktek konservasi SDA yang dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan di atas mengingat keduanya baru saja melibatkan diri dengan gerakan ini.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Cooke, Bill, Uma Kothari (eds.). 2002. *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books.
- Dewitt, Calvin. 1998. "The Three Big Questions". Dalam Richard Folz (ed.). 2003. *Worldviews, Religion and the Environment: A Global Anthology*. Belmont: CA Wadsworth.
- Foltz, Richard. 2003. "Islamic environmentalism: a matter of interpretation" Dalam Richard Foltz, Frederick Matthewson Denny, and Baharudin Azizan (eds.) *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gottlieb, Roger. 2006. *A Greener Faith: Religious Environmentalism in Our Planet's Future*. Oxford University Press.
- Kaza, Stephanie. 2000. "To Save All Beings: Buddhist Environmental Activism" Dalam Christopher S. Queen (ed.). *Engaged Buddhism in the West*. Boston: Wisdom Publications.

¹³ Temuan mengenai adanya komitmen setengah hati dalam mempraktekkan konservasi ini didasarkan pada hasil diskusi dengan banyak pihak (pengurus ormas, pengikut, akademisi, dan tokoh masyarakat).

- Khalid, Fazlun. 1992. "The Disconnected People." Dalam Fazlun Khalid dan Joanne O'Brien (eds.). *Islam and Ecology*. New York: Cassell.
- Kinsley, David. 1994. *Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-cultural Perspective*. London: Prentice-Hall.
- Mawardi, Muhjidin. 2007. *Lingkungan: Sebuah Amanah*. Jakarta: Lembaga Lingkungan Hidup Muhammadiyah.
- Millais, Corin. 2006. *Common Belief: Australia's Faith Communities on Climate Change*. Sydney: Climate Institute.
- Palmer, Martin dan Victoria Finlay. 2003. *Faith in Conservation: New Approaches to Religion and Environment*. Washington DC: World Bank.
- Swearer, Donald K. 1997. "The Hermeneutics of Buddhist Ecology in Contemporary Thailand: Buddhadhasa and Dhammapitaka" Dalam Mary Evelyn Tucker dan Duncan Ryuken Williams (eds.). *Buddhism and Ecology: The Interconnection of Dharma and Deeds*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Taylor, Bron. 2010. *Dark Green Religion: Nature Spirituality and the Planetary Future*. Berkeley: University of California Press.
- Yafie, Alie. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.

Jurnal

- Acheson, James. 2006. "Institutional Failure in Conservation" *Annual Review of Anthropology*. 35: 117–134.
- Amri, Ulil. 2011. "Faith-Based Mass Groups Take on Climate Change" *Strategic Review: The Indonesian Journal for Leadership, Policy, and World Affairs*, 1(1): 95–108.
- Bhagwat, Shonil. Allison Ormsby, Claudia Rutte. 2011. "The Role of Religion in Linking Conservation and Development: Challenges and Opportunities" *Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture*. 5(1): 39–60.
- Boyd, J.M. 1984. "The Role of Religion in Conservation" *The Environmentalist*. 4(7): 40–44.
- Callicott, J. Baird dan Karen Mumford. 1997. "Ecological Sustainability as a Conservation Concept" *Conservation Biology*. 11(1): 32–40.
- Clarke, Gerard. 2007. "Agents of Transformation? Donors, Faith-based Organisations and International Development" *Third World Quarterly*. 28(1): 77–96.
- Folz, Richard, Manya Saadi-Nejad. 2007. "Is Zoroastrianism an Ecological Religion?" *Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture*. 1(4): 413–430.
- Haluza-Delay, Randolph. 2008. "Churches Engaging the Environment: An Autoethnography of Obstacles and Opportunities" *Research in Human Ecology* 15(1): 71–81.
- Harris, Ian. 1991. "How Environmentalist is Buddhism?" *Religion*. 21: 101–114.
- Jenkins, Willis. 2009. "After Lynn White: Religious Ethics and Environmental Problems". *Journal of Religious Ethics* 37(2): 283–309.

- Mangunjaya, Fachruddin, Iwan Wijayanto, Jatna Supriatna, Harfiah Haleem, Fazlun Khalid. 2010. "Muslim Projects to Halt Climate Change in Indonesia" *Journal of Islamic Perspective*. 3: 116–130.
- Nugteren, Albertina. 2010. "Weaving Nature into Myth: Continuing Narratives of Wood, Trees, and Forests in the Ritual Fabric around the God Jagannath in Puri" *Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture*. 4(2): 159–172.
- Peterson, M. Nils & Jianguo G. Liu. 2008. "Impacts of Religion on Environmental Worldviews: The Teton Valley Case" *Society and Natural Resources* 21: 704–18.
- Platteau, Jean-Philippe. 2004. "Monitoring Elite Capture in Community-Driven Development" *Development and Change*. 35(2): 223–246.
- Posas, Paula J. 2007. "Roles of Religion and Ethics in Climate Change". *Ethics in Science and Environmental Politics*. 31–49.
- Rolston, Holmes. 1996. "The Bible and Ecology" *Interpretation: Journal of Bible and Theology*. 50: 16–26.
- Van Houtan, Kyle S. 2006. "Conservation as Virtue: a Scientific and Social Process for Conservation Ethics", *Conservation Biology* 20: 1367–72.
- White, Lynn. 1967. "The Historical Roots of Our Ecological Crisis" *Science*. 155: 1203–1207.
- Winkler, Tanja. 2008. "When God and Poverty Collide: Exploring the Myths of Faith Sponsored Community Development" *Urban Studies*. 45: 2099–116.